

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem ekonomi daerah dengan membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah yang terdiri dari atas provinsi, daerah Kabupaten, dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat.¹ Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.² Kinerja keuangan adalah pengakuan kinerja instansi yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan instansi. Kinerja keuangan akan menunjukkan penilaian hasil kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya yang dapat dibandingkan bagaimana kecenderungannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahirlah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah,

¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-Perubahannya* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 45.

² Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Desanta Publisher, 2021), 2.

meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan.³ Peran aktif pemerintah daerah ketika mengatur daerahnya sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan otonomi daerah ialah wewenang, kewajiban dan hak daerah otonomi untuk mengelola sendiri urusan pemerintah serta keperluan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Pemerintah daerah yang menjadi pihak untuk menjalankan tugas pemerintah, pelayanan, dan pembangunan terhadap masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai, apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau kurang baik. Analisis rasio merupakan alat yang dipakai dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah.⁴ Analisis rasio merupakan suatu penelitian terhadap peristiwa atau kejadian dengan menggunakan pertimbangan antara dua aspek atau lebih yang hasilnya dijelaskan melalui angka.⁵ Pada umumnya perhitungan rasio-rasio data keuangan adalah guna menilai kinerja perusahaan di masa lalu, saat ini dan berbagai kemungkinannya di masa depan.⁶

³ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 3.

⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.

⁵ Nurhayati Nurhayati, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu," *Cano Ekonomos* 4, No. 1 (2015): 55–66.

⁶ Hantono, *Konsep Analisa Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Dan Spss* (Deepublish, 2018), 8.

Umumnya sumber keuangan daerah Sebagian besar masih berupa bantuan dari pemerintahan pusat. Hanya Sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah. Ini jelas akan mengurangi sifat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan.⁷ Sebab anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.⁸ Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan, demikian juga semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.⁹

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang kuat, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional.¹⁰ Dari berbagai rumusan otonomi daerah dalam Undang-Undang yang pernah berlaku, otonomi daerah memiliki makna korelatif sebagai kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada

⁷ Syamsi Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 222.

⁸ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Cet. 1. (Pejaten Barat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122.

⁹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Rajawali Pers, 1988), 61.

¹⁰ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Serial Otonomi Daerah (Yogyakarta: Andi, 2002), 8.

¹¹ Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 22.

pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah. Pendapatan asli pada suatu daerah dapat dikatakan dengan kategori efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Dalam hal demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar nilai suatu rasio efektivitas maka akan semakin besar baik kinerja pemerintahnya.¹² Rasio efisiensi juga merupakan salah satu alat hitung analisis tingkat efisiensi daerah yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, oleh karena itu perusahaan menggunakan rasio efisiensi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun.¹³ Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.¹⁴

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kini Kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2021. “Predikat WTP yang diraih Pemkab Pamekasan kali ini tentu tidak lepas dari peran aktif semua pihak”, kata Bupati Pamekasan dalam keterangan persnya kepada media. Predikat dengan opini WTP tersebut didapat Pemkab Pamekasan, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir ini, sekaligus menjadi penghargaan ketiga secara di bawah kepemimpinan Bupati Pamekasan. BPK RI memberikan predikat WTP

¹² Azizah Widyastuti Harahap et al., “Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan,” *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 8, no. 1 (August 2, 2021): 41, <https://doi.org/10.30743/akutansi.v8i1.4063>.

¹³ Yoyo Sudaryo Et Al., *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 13.

¹⁴ Anis Karlina And Nur Handayani, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 6, No. 3 (2017): 914.

atas laporan keuangan Pemkab Pamekasan berdasarkan pertimbangan pada empat hal. Pertama, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Keempat, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

Pada saat itu, perwakilan BPK Jawa timur menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada lima kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Kelima kabupaten itu semua menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Pamekasan. Alasan peneliti mengambil penelitian pada Kabupaten Pamekasan hal ini dikarenakan salah satunya untuk kabupaten Bangkalan BPK menyampaikan tiga poin perbaikan yaitu, pertama tentang sistem pelaporan manual yang belum sepenuhnya mendukung penyusunan laporan. Kedua, penatausahaan aset tetap di Pemkab Bangkalan yang belum tertib, dan yang ketiga, adanya keputusan kepala daerah terkait pembayaran honorarium yang belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Pada Kabupaten Gresik, meliputi, kesalahan penganggaran belanja modal pada Dinas Perhubungan serta belanja barang pada sebelas OPD, adanya kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta temuan tentang pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum terselenggara secara tertib.

Untuk Kabupaten Sidoarjo pada dua hal, yakni, pembayaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan daerah yang belum berdasarkan data mutakhir,

serta temuan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air serta denda keterlambatan. Sementara untuk Kabupaten Sumenep, rekomendasi yang disampaikan oleh BPK terkait kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan serta denda keterlambatan penyelesaian atas pekerjaan belum dipungut pada empat OPD. Sedangkan pada Kabupaten Pamekasan menerima predikat WTP oleh BPK RI berdasarkan pertimbangan pada empat hal. **Pertama**, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). **Kedua**, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Ketiga**, efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). **Keempat**, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).¹⁵

Dasar yang dapat digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend, dan analisis rasio. Maka penulis mengangkat judul sebagai berikut: “Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan”.

¹⁵ “Laporan Keuangan Pemkab Pamekasan 2021 Raih Predikat Wtp – Pamekasan Hebat,” Accessed November 11, 2022, <https://pamekasanhebat.com/2022/05/19/laporan-keuangan-pemkab-pamekasan-2021-raih-predikat-wtp/>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan di atas maka penelitian ini dapat ditarik menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2019-2021?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapa saja yang berkaitan dengan perhitungan rasio keuangan yang digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan. Serta juga diharapkan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari di bangku perkuliahan.

a. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan pengetahuan serta diharapkan menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan daya pola berpikir mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura.

b. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini penulis bermaksud untuk memaparkan dan mengembangkan pola pikir sekaligus menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi peneliti serta sebagai dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti mengenai analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi dalam pengembangan teori mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Selain itu diharapkan dapat dijadikan patokan baik dalam menyusun dan melakukan penelitian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Pamekasan.

Secara operasional penelitian ini dirumuskan sebagai berikut untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Pamekasan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan maka dalam penelitian ini sangat membatasi permasalahan yang sudah ada sebagai berikut:

1. Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan menjadi objek yang akan diteliti oleh peneliti karena objek penelitian tersebut lebih dekat dengan domisili dibandingkan dengan empat Kabupaten lain yang juga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Laporan keuangan

Laporan keuangan diambil oleh peneliti di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pamekasan berupa laporan keuangan tahunan pada periode 2019-2021.

F. Definisi Istilah

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana sesuatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.¹⁶

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Keuangan daerah menurut Yuwono adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.¹⁷ Jadi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah suatu badan yang menyelenggarakan pemerintahan daerah yang erhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

G. Kajian Penelian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, telah ditemukann beberapa refrensi yang dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu karena adanya kemiripan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Badan

¹⁶ Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan* (Jakarta : Desanta Multiavisitama, 2020), 2.

¹⁷ Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, And Abdul Wachid, “Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan),” N.D., 113.

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pamekasan”. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki sedikit kemiripan dengan tema yang penulis teliti diantaranya:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Amiroh Rosyidah, Tatas Ridho Nugroho, dan Toto Heru Dwihandoko	Analisis kinerja keuangan dan kemampuan keuangan daerah pemerintah kota Malang tahun 2013-2016	Deskripsi Kuantitatif	Mengatakan bahwa kinerja keuangan kota Malang dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yang baik dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 31.02%, efektifitas pajak daerah 115,39%, alokasi belanja masih pertumbuhan yang berfluktuatif. Kemampuan kinerja kota malang mengalami kecenderungan yang positif, namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan tingkat rata-rata rasio DOF 25% dan IKR 29,38%. ¹⁸
2.	Mega	Analisis	Deskriptif	Mengatakan bahwa hasil

¹⁸ Amiroh Rosyidah, Tatas Ridho Nugroho, And Toto Heru Dwihandoko, “Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2016,” N.D., 1.

	Oktavia Ropa	Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan		penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas dapat dikategorikan efektif, rasio efesiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik. ¹⁹
3.	Anim Rahmayati	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2011-2013	Deskriptif kuantitatif	Mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo masim belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya

¹⁹ Mega Oktavia Ropa, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, No. 2 (August 27, 2016),

				bantuan dari pusat provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena Sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi dari pada belanja modal. ²⁰
4.	Veronika Perwita Kusumadewi	Kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2015-2019	Deskriptif kuantitatif	Mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi, akan tetapi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) belum cukup efektif dan efisien. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatera Selatan masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Perhitungan rasio keserasian juga memperlihatkan belanja operasi mendominasi alokasi belanja daerah alih-alih belanja modal. ²¹
5.	Azizah Widyastuti	Analisis <i>growth ratio</i> ,	Deskriptif kuantitatif	Mengatakan bahwa penelitian ini menunjukkan kinerja

²⁰ Anim Rahmawati, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013,"

²¹ Veronika Perwita Kusumadewi, "Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015-2019," N.D., 13.

	Harahap dan Syamsul Efendi	rasio efisiensi pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan		keuangan pemerintah kota Medan dengan menggunakan Growth Ratio atau Rasio Pertumbuhan masih belum optimal karena terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2018 akibat penurunan pendapatan daerah di kota Medan. ²²
--	----------------------------	--	--	---

Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian:

1. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan analisis kinerja keuangan pada perusahaan. Menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Perbedaan kota tempat, serta perbedaan pada periode penelitian dilakukan.
2. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi.
Perbedaan dalam penelitian ini yaitu perbedaan kota penelitian serta tidak adanya periode yang diteliti.
3. Persamaan dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
Perbedaan tahun periode serta penggunaan dana, pada penelitian tersebut dana masih belum berimbang karena sebagian dana masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

²² Harahap Et Al., "Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan."

4. Persamaan dalam penelitian ini pada rasio yang digunakan, Sejenis penelitian yang digunakan kuantitatif serta mengambil sumber data sekunder.

Perbedaan pada penelitian ini adalah jumlah rasio yang digunakan.

5. Persamaan penelitian adalah mengukur kinerja keuangan pada perusahaan dengan menggunakan rasio efisiensi dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif.

Perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan rasio pertumbuhan dengan hasil yang belum optimal pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan.